

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt
Edisi Khusus

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

Baubau Post

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

Jumat
22 November 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Pj Walikota Dr Muh Rasman Manafi Rapat Dengan Forkopinda Bahas Isu Strategis Jelang Pencoblosan di Baubau



Pj Walikota Baubau Dr Muh Rasman Manafi bahas isu strategis dengan Forkopinda jelang pencoblosan

Laporan: Ardi, Baubau Post, Durasi Times

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si melakukan rapat Forkopimda membahas isu strategis menjelang hari H Pemilihan Kepala Daerah di Kota Baubau pada Selasa (19/11/2024) di ruang Kerja Wali kota Baubau. Beberapa isu strategis yang dibahas yakni tahapan finalisasi Pilkada yang sudah memasuki tahapan kampanye akbar dan sebentar lagi akan memasuki masa tenang.

Peringati Hari Ikan Nasional, 1000 Paket Makanan Bergizi Gratis di Bagikan



Laporan: Amat Jr

BAUBAU, BP-Memperingati Hari Ikan Nasional ke-11 tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kota Baubau membagikan 1000 paket Makanan Bergizi Gratis di SDN 3 Katobengke pada Kamis (21/11/2024).

akan Kota Baubau membagikan 1000 paket Makanan Bergizi Gratis di SDN 3 Katobengke pada Kamis (21/11/2024).

Lanjutkan ke Hal: 7

Dorong Hilirisasi dan Ketahanan Energi Pemprov Sultra selenggarakan Rakor Rencana Rosatom Investasi PLTN di Sultra



Laporan: Mashuri

KENDARI, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) ter-

kait rencana investasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Senin (18/11/2024). Kegiatan

Lanjutkan ke Hal: 7

Kompolnas Minta Polda Serious Ungkap Penembakan di Polres Solok Selatan

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polda Sumatera Barat bekerja serius untuk mengungkap kasus penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyanto Anshari yang dilakukan oleh sesama polisi berpangkat sama.

Komisioner Kompolnas Komisioner Kompolnas, Choirul Anam mengatakan pihaknya juga memberikan asis-



Anggota Kompolnas M Choirul Anam

tensi dalam penanganan kasus ini.

Lanjutkan ke Hal: 7

Lanjutkan ke Hal: 7

Dr Muh Rasman: Dokumen Rencana Kontigensi TTE Pelabuhan Murhum Baubau Harus Matang



Pewarta: Lisna

BAUBAU, BP-Imigrasi port dapat memastikan kemajuan pembangu-

nan di Indonesia karena dapat menjadi pintu masuk dan pintu keluar untuk berinteraksi dengan dunia luar dan kalau

itu tidak dibuat, tidak siap dan tidak terintegrasi maka defisiensi

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA

PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



Pj Walikota Dr Muh Rasman Manafi Rapat Dengan Forkopinda Bahas Isu Strategis Jelang Pencoblosan di Baubau

penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) serta beberapa isu tambahan terkait dengan KPU Baubau.

Menurutnya saat ini tahapan Pilkada Kota Baubau telah memasuki kampanye akbar dimana masing-masing pasangan calon sudah terjadwal kapan dan dimana lokasi kampanye akbarnya. Kemudian, setelah kampanye akbar dilanjutkan dengan minggu tenang yang diharapkan dapat tercipta suasana yang kondusif mulai dengan hari penjoblosan di tiap-tiap TPS sesuai dengan pilihan masing-masing wajib pilih sampai pengumuman pasangan calon terpilih.

Oleh sebab itu, baik itu TNI maupun Polri sebagaimana tupoksi

yang ada untuk tetap menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau tahun 2024 sampai dengan pengumuman pasangan calon terpilih dengan saling bekerja sama dalam rangka menjaga kondusifitas kamtibmas sesuai dengan peran masing-masing.

Selain itu, Dr H Muh Rasman juga mengingatkan pentingnya untuk pengawasan pada tiap TPS dan ini menjadi perhatian dan fokus bersama, baik TNI, Polri, Linmas (Satpol PP). Kemudian, KPU Kota Baubau telah melakukan pemantauan pada titik-titik TPS yang dipersiapkan dan terkoneksi dengan jar-

ingan. Serta Badan Kesbangpol Kota Baubau akan memantau dengan tiap TPS satu orang dalam hal monitor situasi sesuai dengan mekanisme yang ada sampai dengan perhitungan hasil akhir tiap TPS.

Terkait dengan penertiban APK, sesuai dengan hasil rapat tanggal 16 dan 17 November 2024, agar tiap LO masing-masing pasangan calon telah menertibkan APK masing-masing sudah harus selesai sebelum memasuki hari pencoblosan. Namun karena kondisi lapangan yang belum sepenuhnya terlaksana, perlu kiranya Satpol PP dan pihak terkait bersama menertibkan serta menghimbau agar APK

yang ada tiap lingkungan, dengan saling koordinasi yang baik.

Sementara itu, KPU Kota Baubau telah berkoordinasi dengan KPU Propinsi Sultra sehubungan dengan jumlah surat suara yang kurang sebanyak 216 (dua ratus enam belas) surat suara. Kemudian, adanya daftar pemilih tambahan sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) sehingga jumlah surat suara secara keseluruhan $108.628 + 395 = 109.023$. Sedangkan untuk tambahan surat suara yang dipersiapkan adalah jumlah $DPT \times 2,5\%$ ($109.023 \times 2,5\% = 2.725,575$). Jika di bulatkan menjadi 2.726. Jadi surat suara yang dipersiapkan $109.023 + 2.726 = 111.749$.(*)

Dorong Hilirisasi dan Ketahanan Energi Pemprov Sultra selenggarakan Rakor Rencana Rosatom Investasi PLTN di Sultra

yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Prov. Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dan dihadiri delegasi Federasi Rusia serta sejumlah pejabat daerah.

Delegasi Federasi Rusia dipimpin oleh Duta Besar Rusia, Mr. Sergei Gennadievich Tolcenov, didampingi oleh Mr. Alexander Masaltsev (Perwakilan Perdagangan Rusia) dan Anna Belokoneva (Perwakilan Rosatom). Selain itu, hadir pula Dr. Ir. Musri Maâ€™TMwaleda, M.T. (Anggota Dewan Energi Nasional), sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, serta perwakilan kabupaten, perguruan tinggi, dan UPTD PLN Persero Kendari.

Sekda Sultra menekankan bahwa Provinsi Sultra memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah seperti nikel, emas, dan aspal. Potensi tersebut kini diharapkan dari kegiatan ini juga menjadikan ikan sebagai sumber protein strategis dalam program Makan Bergizi Gratis.

“Hari ini kami membagikan Makan Bergizi Gratis menu ikan total sebanyak 1000 (seribu) paket yang didahului dari jam 08.30 Wita dibagikan di SD Negeri 2 dan 4 Katobengke dan kami lanjutkan saat ini membagikan Makan Gizi Gratis menu ikan di SD Negeri Katobengke. Kegiatan kita ini juga kami link kan dengan zoom Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan acara yang sama peringatan Hari Ikan Nasional ke-11,” ungkapnya. (*)

(76%), minyak bumi (19%), dan gas bumi, sementara energi terbarukan hanya 5%. Dengan kebutuhan listrik industri pertambangan yang diproyeksikan mencapai 4,02 MW, pembangunan PLTN akan menjadi solusi penyediaan energi bersih, stabil, dan efisien,” ungkapnya.

Rencana investasi Rosatom tidak hanya memenuhi kebutuhan energi jangka panjang tetapi juga mendukung keberlanjutan energi, ketahanan ekonomi, dan target global pengurangan emisi karbon.

Duta Besar Rusia, Mr. Sergei Gennadievich Tolcenov, mengapresiasi penyelenggaraan Rakor ini sebagai bagian dari penguatan kerja sama bilateral Indonesia-Rusia yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi di bidang energi dan pengembangan sumber daya manusia.

Duta Besar menyebutkan, dalam pertemuan dengan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, di Moskow pada Juli 2024, telah dibahas pengembangan kerja sama energi nuklir yang melibatkan transfer teknologi dan pendidikan. Pertemuan itu juga juga Pemerintah Rusia menawarkan peluang beasiswa bagi

mahasiswa Indonesia, khususnya dari Sultra, untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM di bidang Energi Nuklir.

Selain itu, Anna Belokoneva dari Rosatom menjelaskan bahwa perusahaannya telah membangun 33 reaktor nuklir skala besar di berbagai negara, termasuk India, Cina, dan Bangladesh. Rosatom juga menawarkan teknologi reaktor kecil dengan kapasitas 55 hingga 110 MW yang telah teruji keamanannya, termasuk perlindungan dari risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

Dr. Ir. Musri Maâ€™TMwaleda, M.T., anggota Dewan Energi Nasional, menyampaikan bahwa pengembangan Energi Nuklir sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional yang baru, menggantikan PP No. 79 Tahun 2014. Energi nuklir diproyeksikan menjadi bagian dari bauran energi nasional untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060.

Rakor ini diakhiri dengan diskusi, sesi tanya jawab, dan penyerahan cendera mata dari Anggota Dewan Energi Nasional kepada Duta Besar Rusia yang dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan investasi PLTN, mendukung Hilirisasi Industri, dan meningkatkan ketahanan energi di Sulawesi Tenggara. (*)

Peringati Hari Ikan Nasional, 1000 Paket Makanan Bergizi Gratis di Bagikan

Pj Wali Kota Baubau yang diwakili Asisten II Setda Kota Baubau Dra Hj Asmahani, M.Si saat menghadiri pembagian 1000 paket Makan Bergizi Gratis mengungkapkan, komitmen pemerintah saat ini dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia telah mendeklarasikan program Asta Cita yang salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis yang dihususkan untuk anak didik di seluruh Indonesia.

Seiring hal tersebut, Pemerintah Kota Baubau telah menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat

Kota Baubau yang dimulai dari kecamatan dan kelurahan dan Pemkot Baubau juga melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Baubau setiap tahun rutin melaksanakan sosialisasi gemar makan ikan dimana sasarannya adalah anak-anak dan ibu hamil.

Dikatakan, Pemkot Baubau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pengendalian dan Penguasaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kota Baubau atas kerjasamanya dalam pelaksanaan kegiatan makan bergizi gratis yang dimas dalam menu ikan. Seribu paket kepada siswa-siswi SD Negeri 2, 3 dan 4 Katobengke

Kecamatan Betoambari. “Semoga program ini dapat berkelanjutan dan menjadi contoh baik bagi OPD dan instansi vertikal lainnya,” katanya.

Ditempat yang sama Yuni Irawati Wijaya Kepala Stasiun KIPM Baubau menjelaskan, kegiatan Makan Bergizi Gratis di SDN 3 Katobengke dengan menu ikan juga merupakan bentuk dukungan KIPM Baubau kepada Pemkot Baubau dalam pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya protein ikan, yang pada akhirnya meningkatkan angka konsumsi ikan yang dapat menurunkan prevalensi

stunting. Karena itu diharapkan dari kegiatan ini juga menjadikan ikan sebagai sumber protein strategis dalam program Makan Bergizi Gratis.

“Hari ini kami membagikan Makan Bergizi Gratis menu ikan total sebanyak 1000 (seribu) paket yang didahului dari jam 08.30 Wita dibagikan di SD Negeri 2 dan 4 Katobengke dan kami lanjutkan saat ini membagikan Makan Gizi Gratis menu ikan di SD Negeri Katobengke. Kegiatan kita ini juga kami link kan dengan zoom Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan acara yang sama peringatan Hari Ikan Nasional ke-11,” ungkapnya. (*)

Kompolnas Minta Polda Serious Ungkap Penembakan di Polres Solok Selatan

“Kompolnas memberikan atensi mendalam terkait kasus ini. Oleh karenanya rekan-rekan Polda ya memang harus bekerja serius untuk mengungkap kenapa peristiwa ini bisa terjadi, gitu ya,” kata Anam saat dikonfirmasi, Jumat (22/11).

Anam menyebut salah satu yang harus diungkap adalah latar belakang dari aksi penembakan tersebut. Apalagi, penembakan itu terjadi saat korban sedang menangani sebuah perkara.

“Karena informasi awal yang kami dapat ya kaset reskrim ini sedang melakukan tugas dan fungsinya sebagai serse untuk masalah tertentu. Oleh karenanya apakah ini ya latar belakang ini dengan korban yang meninggal sedang melakukan tugas dan ditembak oleh petugas

yang lain,” tutur dia.

“Ini adalah bagian dari soal-soal yang melatarbelakangi apa namanya tindakan atau menjalankan tugas-tugas tupuksi dari korban. Kalau itu sangat terkait dengan hal itu, masalahnya menjadi serius dan harus ditindaklanjuti juga dengan serius,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Anam juga menyebut Polda Sumatera Barat harus menelusuri apakah ada pihak lain yang terlibat dalam aksi penembakan.

“Tidak hanya terkait pelaku yang menembak, tapi apakah ada latar belakang yang lebih jauh, ada aktor yang juga lebih jauh,” ujarnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyanto Anshari yang menjadi korban penembakan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP DI di Ma-

polres Solok Selatan Sumatera Barat (Sumbar).

Akibatnya korban mengalami luka yang amat serius dan harus dirujuk ke Kota Padang untuk mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar.

Meski demikian, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Rencananya, jenazah korban akan diterbangkan ke daerah asalnya, Makassar, Sulawesi Selatan.

Buntut peristiwa ini, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono menyatakan akan memberikan sanksi pemecatan terhadap DI.

“Pastinya tindakannya tegas, dalam minggu ini kami sudah ada proses PTDH dalam minggu ini, setidaknya-tidaknya sampai 7 hari ke depan,” kata dia. (*)

Dr Muh Rasman: Dokumen Rencana Kontigensi TTE Pelabuhan Murhum Baubau Harus Matang

banyak kebocoran. Karena itu, penyusunan dokumen rencana kontigensi dan Table Top Exercise (TTE) di Pelabuhan Baubau harus dipersiapkan secara matang terutama dalam hal perencanaan.

Demikian dikatakan Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat membuka acara penyusunan dokumen rencana kontigensi dan table top exercise (TTE) di Pelabuhan Baubau Selasa (19/11/2024).

Menurutnya, Kota Baubau sudah mene-

tapkan visinya sebagai satu Hub Maritim di Sulawesi dan secara sederhana sesungguhnya Hub tersebut adalah satu media yang menghubungkan satu titik dengan titik yang lain itu dalam konteks kewilayahan dan itulah konektivitas. Digambarkan, sejak 400 tahun yang lalu Baubau sudah memerankan itu dan terbukti dengan adanya kerjasama dagang antara kerajaan Buton dengan VOC sebelum Indonesia merdeka.

Kemudian, adanya kerjasama dagang antara Kesultanan Buton dengan Tidore, Ternate,

Makassar bahkan sampai bisa dilihat bukti-bukti perdagangan terutama di Wakatobi dengan Singapura, Malaysia terus berlangsung dan sesungguhnya sudah terbangun. “Jadi pusat wilayah Sultra itu ada di Baubau, kenapa saya bilang pusat karena pusat pemerintahannya disini, pusat kebudayaannya disini, bahkan teritorial ada disini. Dan sejak Sulawesi tenggara masih kabupaten salah satu bagian provinsi Sulawesi Selatan maka Baubau itu adalah ibu kota kabupaten,” ungkapnya.

Demikian pula dengan pendidikan yang pertama di bangun di

Sulawesi Tenggara itu juga ada di Baubau. Begitu juga interaksi orang paling tinggi sejak 500 tahun yang lalu ada di Baubau, artinya bahwa memerankan sebagai wilayah konektivitas wilayah Hub yang berbasis maritim dimana bukan hanya berbicara perdagangan dan transportasi laut tetapi ada 11 cluster maritim, mulai dari perikanan, kelautan, perdagangan, energi dilaut, pertahanan keamanan, jasa dan industri kelautan sampai pada diplomasi, diplomasi harus kuat karena Indonesia adalah negara kepulauan yang diakui oleh PBB bahkan dunia. (*)

Gibran Perintahkan Mendikdasmen Hapus Sistem Zonasi



Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengaku telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk menghapus sistem zonasi sekolah

Laporan: Hadi (21/11). Gibran mengatakan dalam satu rapat koordinasi dengan para kepala dinas pendidikan, ia telah meminta mereka agar memprioritaskan persoalan pendidikan di Indonesia. Ia menyebut pendidikan merupakan faktor kunci dalam menyongsong Indonesia Emas pada 2045. Selain itu, Gibran juga menyampaikan pentingnya pendidikan coding atau pemrograman menjadi mata pelajaran sejak dini bagi peserta didik.

“Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan ‘Pak ini zonasi harus dihilangkan,’” kata Gibran dalam pidatonya di Pembukaan Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah, Jakarta, Kamis

Baleg Ungkap Alasan RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas



Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan alasan RUU Perampasan Aset tak termasuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025.

Laporan: Hasim Doli beralasan pengesahan RUU Perampasan Aset tak bisa tergesa-gesa dan harus dilakukan kajian terlebih dahulu terkait kecocokan dengan sistem hukum di Indonesia. Ia mengklaim seandainya RUU Perampasan Aset kurang cocok diterapkan di Indonesia yang menggunakan aturan tertulis terkodifikasi sebagai sistem hukum primer (Eropa Kontinental). “Ya itu tadi, kita harus mengkaji. Tapi soal tadi itu ya, ka-

rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (11/11). Ia pun menekankan agar kondisi pemerataan guru juga menjadi pertimbangan penting selain fasilitas yang belum merata. Ia pun meminta agar ada jalan keluar atas permasalahan sistem zonasi. “Jadi zonasi sekali ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” kata Gibran.(*)

lau menurut saya, kalau kita lihat ya, undang-undang itu (Perampasan Aset) lebih tepat dipergunakan oleh negara yang bermazhab hukum Anglo-Saxon,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11). “Nah, sementara kan kita Eropa Kontinental. Nah, ini yang nanti harus kita sesuaikan,” sambung-nya. Oleh karena itu, Doli menilai hal yang paling krusial dalam pembahasan RUU Perampasan Aset adalah menyusun aturan yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia. “Di mana misalnya konten-konten materi-materi yang sekarang ada di draft

PKS Desak Ada Tenggat Waktu bagi Prabowo Teken Keppres Pemindahan IKN



Presiden RI Prabowo Subianto.

Laporan: Listar JAKARTA-Anggota Baleg DPR Fraksi PKS Anis Byarwati mendesak Presiden Prabowo Subianto diberikan tenggat waktu untuk menekan keputusan presiden pemindahan Ibukota Negara ke Nusantara, Kalimantan Timur. Anis mengatakan batas tenggat waktu bagi Prabowo itu dapat diatur dalam RUU DKJ yang akan disahkan menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. “Untuk mengatasi ketidakpastian hukum perihal status Jakarta maka perlu untuk menegaskan batas waktu terbitnya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Nusantara dalam ketentuan peralihan yang diatur dalam undang-undang tentang DKJ,” kata

Anis saat memberikan catatan mini fraksi dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11). Anis menilai tenggat waktu itu diperlukan agar proses peralihan Ibukota dari Jakarta ke Nusantara dapat berjalan dengan baik. Ia juga berharap pemberian batas waktu itu dapat digunakan untuk mempersiapkan segala konsekuensi hukum yang harus diatur akibat perpindahan Ibukota. “Penentuan batas waktu ini akan mendorong persiapan yang efektif dari transisi pemindahan Ibukota Negara dan segala akibat hukumnya dengan tingkat waktu yang jelas,” ujar dia. Saat ini seluruh Fraksi Baleg DPR RI telah menyepakati RUU DKJ untuk disahkan sebagai Undang-undang

dalam rapat paripurna. Baleg dan Pemerintah juga telah menyetujui empat Penambahan pasal yang tercantum dalam RUU DKJ. Keempat pasal itu mengatur soal perubahan nomenklatur DKI Jakarta menjadi DKJ pada anggota DPR, DPRD, dan DPD yang terpilih dan dilantik hasil Pemilu 2024. Satu pasal lainnya akan mengubah nomenklatur gubernur Jakarta yang terpilih pada Pilkada serentak 27 November 2024. Pembahasan RUU DKJ oleh Baleg dan Pemerintah ini juga tergolong sangat cepat. Baleg hanya butuh waktu 6 hari untuk membahas RUU DKJ setelah RUU ini disahkan menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (12/11) lalu. (*)

yang sudah dibuat, kalau sudah ada gitu ya yang memang tidak bertentangan dengan sistem hukum kita, itu yang paling penting,” tutur dia. Di sisi lain, Doli menjelaskan RUU Perampasan Aset juga perlu dilakukan kajian ulang meski telah masuk prolegnas menengah 2025-2029. Ia menyoroti redaksional ‘Perampasan’ dalam RUU Perampasan Aset yang dinilai memiliki artian yang keliru dan tidak sesuai Konvensi Anti Korupsi Internasional (UNCAC). “Makanya waktu itu saya bilang, kalau misalnya disetujui substansi undang-undang itu adalah bagian dari pemberantasan korupsi, kenapa enggak namanya kita buat pemulihan atau pengelolaan aset,” ujar dia. RUU Perampasan Aset ini mandek selama lebih dari satu dekade setelah nas- kah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023 RUU Perampasan Aset masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023. Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga telah mengirim surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset. Surpres itu bernomor R 22-Pres-05-2023 dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR. Namun, setahun berlalu RUU tersebut tak kunjung selesai.(*)

Rakor TPID Sultra, Fokus Pengendalian Inflasi dan Ekonomi Daerah

Pemprov. Sultra Hadiri Rakor Inflasi dan Bencana Hidrometeorologi secara virtua



Pj Gubernur Sultra ABR

Pewart: Mashuri

KENDARI, BP-Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (RAKOR) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Tenggara di ruang pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.

Acara ini dihadiri oleh Forkopimda Tingkat I Provinsi Sultra, Sekda Provinsi Sultra selaku Ketua Pelaksana Harian TPID, Pimti Pratama di lingkungan Pemprov Sultra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra sebagai Wakil Ketua TPID, seluruh anggota TPID Provinsi Sultra, para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara, serta sejumlah narasumber, termasuk Kepala BPS atau yang mewakili, Kepala Perwakilan BI Sultra, Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Kejati, Kepala Ketua TPID dari Bombana, Konawe, dan Konawe Utara, pimpinan Kementerian/Lembaga di Sultra, serta pimpinan BUMN dan BUMD se-Sultra.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur menekankan pentingnya visi nasional dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa visi Presiden RI untuk

menuju Indonesia Emas 2045 diimplementasikan melalui 8 misi strategis, atau yang disebut Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program percepatan hasil terbaik.

Pj. Gubernur juga menyoroti RPJPN 2025-2045 sebagai pedoman pembangunan jangka panjang, yang akan dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029. Salah satu program prioritas nasional adalah peningkatan gizi masyarakat melalui:

- Pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren.

- Bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.

Poin-Poin Diskusi RAKORDA TPID

1. Stabilitas Harga dan Kebutuhan Pokok

RAKORDA membahas langkah stabilisasi harga untuk menghadapi:

- Anomali musim yang memengaruhi hasil produksi;

- Persiapan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (NATARU);

- Ketahanan stok beras untuk menjaga stabilitas pangan di Sulawesi Tenggara.

2. Tantangan Ekonomi Sulawesi Tenggara

Dalam diskusi, berbagai tantangan ekonomi di Sultra dibahas, termasuk:

- Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal ketiga 2024 tumbuh sebesar 4,95%, sedikit

menurun dibanding kuartal kedua sebesar 5,05%.

- Inflasi

Inflasi Sultra saat ini berada pada angka 0,71%, lebih rendah dari target nasional 1,5%-3,5%.

- Kebijakan Moneter

Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25%, dengan fokus menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.

3. Dinamika Ekspor dan Perdagangan Internasional

Indonesia mencatat peningkatan ekspor sebesar 10,25% (YoY) pada Oktober 2024 dengan nilai \$24,41 miliar. Hal ini memberikan dampak positif pada ekosistem perdagangan di Sulawesi Tenggara.

4. Rekomendasi Strategis

RAKORDA menghasilkan rekomendasi untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Dalam penutupannya, Pj. Gubernur menyampaikan harapannya agar seluruh peserta memahami, memedomani, dan melaksanakan hasil RAKORDA ini dengan sebaik-baiknya. Ia memberikan lima arahan utama:

1. Diharapkan agar kita mengikuti rakor ini dengan sebaik-baiknya

2. Memiliki satu kesatuan pemikiran melihat pengendalian inflasi

3. Implementasikan hasil rakorda TPID 2024 dengan baik

4. Intens monev perkembangan situasi dan dinamikanya

5. Mari kita satukan hati, pikiran, dan teguhkan komitmen kita bersama untuk keberhasilan dalam pengendalian inflasi Sultra

Lebih lanjut disampaikan bahwa Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya menyiapkan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Dalam arahnya, beliau menegaskan perlunya langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk:

1. Meningkatkan konsumsi rumah tangga

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat mengindikasikan daya beli masyarakat yang menurun.

Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat berdampak pada perlambatan ekonomi, mengingat konsumsi domestik adalah pendorong utama produk domestik bruto (PDB).

2. Meningkatkan investasi dan ekspor

Peningkatan investasi, khususnya pada proyek infrastruktur dan pembangunan daerah, diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian Sultra.

3. Tindak lanjut kebijakan moneter

Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi. Keputusan

Sultra, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi. Acara ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Rakor dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam rapat, hadir narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Wakil Menteri Sosial, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan SAR Nasional, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag.

Dari pihak Pemprov Sultra, turut hadir Kepala Biro Perekonomian Setda

Sultra, perwakilan Bulog, Karantina Kendari, dan dinas-dinas terkait lainnya.

Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kesiapan menghadapi dua agenda besar, yakni potensi bencana hidrometeorologi dan pelaksanaan Pilkada serentak. Pilkada serentak dijadwalkan pada Rabu, 27 November 2024, yang telah diusulkan sebagai hari libur nasional sesuai undang-undang.

“Kita perlu mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas masyarakat, khususnya pada masa kampanye hingga hari tenang (24-26 November). Koordinasi dengan Bulog dan distributor pangan juga sangat penting, mengingat adanya fenomena aksi borong bahan pokok selama masa pemilu. Selain itu, kita juga harus bersiap menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru,” ujar Tito.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa kondisi cuaca di Indonesia akhir tahun ini dipengaruhi oleh fenomena La Nina lemah yang akan berlangsung hingga Maret 2025. Periode ini bersamaan dengan musim hujan, terutama pada puncaknya pada Januari-Februari

2025.

“Potensi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, banjir pesisir (rob), tanah longsor, angin kencang, dan kilat/petir, perlu diwaspadai. Sebanyak 15% wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara bagian timur dan utara, diprediksi mengalami curah hujan di atas normal,” jelas Dwikorita.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa pada Oktober 2024 terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas, seperti telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, dan emas perhiasan.

Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) November 2024 hingga 16 November, salah satu wilayah dengan kenaikan IPH tertinggi adalah Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, yang mencapai 2,60%. Komoditas yang memberikan andil terbesar adalah daging ayam ras, cabai rawit, ikan gembung, dan berbagai jenis ikan lainnya.

Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada M2 November 2024 lebih banyak dibandingkan yang mengalami penurunan, menunjukkan dinamika harga bahan pokok yang memerlukan perhatian lebih. (Lisna)

Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga mencerminkan kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian global.

4. Strategi menjaga momentum pertumbuhan

Meskipun terdapat tantangan ekonomi, diperlukan strategi yang tepat untuk menjaga pertumbuhan yang stabil dan menghadapi risiko ekonomi di masa depan.

5. Menyusun langkah kontijensi

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, Sulawesi Tenggara perlu menyusun langkah kontijensi yang tanggap terhadap potensi kedaruratan.

Rapat ini juga menyoroti angka inflasi Sultra yang saat ini berada pada 0,71%, di bawah target ideal nasional sebesar 1,5%-3,5%. Oleh karena itu, rekomendasi Rakorda diharapkan dapat mendukung RKP 2025 yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Rapat dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai moderator. Diskusi difokuskan pada dua hal utama, yaitu dinamika perdagangan internasional, khususnya

dampak ekspor dan impor terhadap ekosistem perdagangan, serta kesiapan strategi daerah dalam menghadapi tantangan inflasi.

Rapat ini juga menengahkan sejumlah narasumber, antara lain perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra serta Kajati Sultra. Hasil diskusi diharapkan mampu memperkuat strategi pengendalian inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)

Jamuri: enyusunan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Tengah tahun 2025-2045 telah memasuki tahap akhir



Pewarta: Rahim

BUTENG, BP-Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Jamuri mewakili Pj Bupati Buton Tengah membuka rapat Penjaminan Kualitas Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Stetegis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Tengah tahun 2025-2045.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah, bertempat di aula kantor Kecamatan Lakudo, Kamis (1/8/2024).

Staf ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan dalam sambutannya mengatakan,

penyusunan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Tengah tahun 2025-2045 telah memasuki tahap akhir.

“KLHS RPJPD tahun 2025-2045 ini akan menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. RPJPD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam proyeksi pembangunan Kabupaten Buton Tengah yang berkelanjutan”,ungkapnya.

Proses penyusunan KLHS kata Staf ahli Bupati, telah mengacu pada peraturan pemerintah no.46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS dan Permendagri no.7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dan penyusunan RPJPD. Dan penyusunan KLHS ini telah sesuai dengan visi RPJPN tahun 2025-2045 atau Indonesia Emas 2045, yaitu terwujudnya Indonesia se-

bagai negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan.

KLHS- RPJPD Kabupaten Buton Tengah juga mengacu pada visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2045 yaitu Sultra Maju, Mandiri dan berkelanjutan. Dan KLHS juga mengacu pada pada visi RPJPD Kabupaten Buton Tengah sebagai pusat pengembangan agribisnis berlandaskan iman dan takwa.

“Pada hari ini kita telah masuk pada tahapan penjaminan kualitas KLHS- RPJPD Buteng 2025-2045. Baru saja tim tenaga ahli penyusun melaporkan mengenai kriteria penilaian mandiri penyelenggaraan KLHS-RPJPD

Buteng 2025-2045, penilaian mandiri dilakukan oleh tim penyusun dan tim pokja KLHS-RPJPD untuk memastikan bahwa kualitas dan proses penyelenggaraan KLHS- RPJPD sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,ujarnya.

Kajian ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh untuk melahirkan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan menjadikan Kabupaten Buton Tengah sebagai daerah yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan jangka panjang.

“Saya berharap, pada tahap akhir penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tengah ini akan menjadi barometer pembangunan Kabupaten Buton Tengah yang mandiri, maju dan berkelanjutan”,tutupnya.

Tingkatkan MPP Digital Kemenpan RB Gelar Sosialisasi se-Sulawesi di Kendari Termasuk Buton



Pewarta: Rahim

BUTON, BP-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Sosialisasi Arah Kebijakan Transformasi Digital Pelayanan Publik Wilayah Sulawesi di salah satu Hotel di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis, 26 Juli 2024.

Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Lade Saifuddin., M. Si, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Kebijakan Transformasi Digital Mal Pelayanan Publik (MPP) Wilayah Sulawesi

Dalam sambutannya, Plh. Sekda menyampaikan selamat datang di bumi anoa Sulawesi Tenggara yang lokus penyelenggaraan Sosialisasi kebijakan di Kota Kendari dan ucapan terima kasih kepada ke deputian pelayanan publik yang telah memilih Sultra sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi kebijakan transformasi digital wilayah Sulawesi.

“Era digital seperti saat ini, transformasi digital menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat kita hindari bahwa digitalisasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Plh. Sekda.

Lebih lanjut, La Ode Saifuddin juga mengatakan melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi diharapkan proses pelayanan publik dapat berlangsung lebih cepat, tepat dan tanpa hambatan

yang berarti. “MPP yang terintegrasi secara digital akan menjadi solusi yang tepat untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik. Selain itu juga, pelayanan publik yang berkualitas adalah landasan utama bagi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera dan berkeadilan. Kemudian akses terhadap pelayanan publik menjadi suatu keharusan yang tidak dapat kita abaikan,” katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden secara virtual, Rira Renata menyampaikan bahwa Presiden RI, Joko Widodo, pada saat SPBE submit 27 Mei 2024 menyampaikan bahwa tolak ukur birokrasi saat ini harus berorientasi pada tingkat kepuasan masyarakat, kemudahan urusan dan peningkatan daya saing. Mulai saat ini, tidak boleh lagi ada egosentris antar instansi, perkuat Interoperabilitas aplikasi pemerintah, ini merupakan sebuah keharusan dalam digitalisasi layanan publik.

Sekedar informasi Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 17 Kab/Kota telah dibangun 6 MPP yakni di Kabupaten Buton, Kolaka, Konawe, Bombana, Kota Baubau dan Kota Kendari.

Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan materi sesi pertama terkait Portal Pelayanan Publik, Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional, dan Transformasi Digital Pelayanan Publik.

Sesi kedua dipaparkan mengenai Mal Pelayanan Publik (MPP), Best Practices Daerah Mal Pelayanan Publik Digital, selain itu juga disosialisasikan terkait kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait MPP Digital dan layanan izin tenaga kesehatan di MPP Digital dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).

Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad menyampaikan sosialisasi ini dilakukan agar pemerintah daerah sebagai pelaksana pelayanan publik memiliki gambaran utuh terkait transformasi digital serta langkah implementasi digitalisasi dalam pelayanan publik yang terintegrasi. Dengan demikian, implementasi digitalisasi pelayanan publik mulai dari pemberian informasi hingga akses pelayanan publik dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan transparan.

Peserta yang diundang dalam sosialisasi ini adalah perwakilan Biro/Bagian Organisasi, Dinas PTSP, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, dari wilayah provinsi di Pulau Sulawesi.

Narasumber dalam sosialisasi ini Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Lira Redata; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DMPTSP) Kota Kendari Maman Firmansyah; Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Jefri Thomas Alfa Edison melalui daring; serta Ketua Tim Pengembangan Sistem dan Aplikasi IKD, Paturi.

Pemkab Buton juga ikut serta dalam giat tersebut yakni Bagian Ortolat Setda, Diskominfo dan Persandian, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.(*)

Sekda Buton Buka Lomba Gebyar Merah Putih

Pewarta: Rahim

BUTON, BP-Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin S.Pd.,M.Si membuka upacara pembukaan lomba gebyar merah putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Buton, di Alun-alun Takawa, Pasarwajo, Selasa 30 Juli 2024.

Pembukaan apel ditandai dengan pelepasan balon merah putih oleh Sekda Buton didampingi Ketua Dharma Wanita Kabupaten Buton, Ny Kiki Amalia Asnawi beserta Para



Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Buton, dan Para Camat se-Kabupaten Buton.

Peserta Upacara diikuti oleh Para Pelajar SD, SMP dan SMA Juga Guru guru dan Para sekolah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bu-

ton. Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin S.Pd.,M.Si menyampaikan bahwa kegiatan gebyar merah putih ini dilaksanakan sebagai wadah pembinaan bagi siswa siswi pada jenjang pendi-

dikan mulai tingkat paud, sd, smp dan sma untuk berkompetisi melalui perwujudan pelajar pancasila yang memiliki global kompetensi dan berperilaku sesuai nilai-nilai pancasila guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan.(*)

Yuk Kenali Lebih Dalam Resistansi AMR



JAKARTA-Resistensi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR) adalah kondisi di mana mikroorganisme mampu bertahan terhadap dosis terapi senyawa antimikroba. Akibatnya, mikroorganisme tersebut tetap dapat berkembang, sehingga mengurangi kemampuan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah kondisi pasien, dan bahkan menyebabkan kematian pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.

AMR merupakan tantangan besar dalam dunia kesehatan. Pada 2019, diperkirakan hampir 5 juta kematian dikaitkan dengan AMR, termasuk 1,27 juta kematian secara langsung disebabkan oleh AMR. AMR menimbulkan ancaman terhadap kesehatan global, ketahanan pangan, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dr. Azhar Jaya mengatakan, AMR merupakan masalah serius pada fasilitas kesehatan di Indonesia. Ancaman resistansi antimikroba merupakan ancaman kesehatan global yang semakin nyata dan mendesak.

“Kemampuan mikroorganisme untuk bertahan terhadap antimikroba seperti antibiotik menyebabkan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan pembiayaan kesehatan secara signifikan,” kata dr. Azhar Jaya dalam Seminar Sehari bertema “Collaborative and Participatory Action in Tackling AMR” dan Pekan Kesadaran Resistansi Antimikroba (WAAW) di Auditorium Siwabessy pada Kamis (21/11/2024).

Menurut dr. Azhar Jaya, beberapa hal penting dalam pengendalian resistansi AMR, di antaranya penguatan sistem

surveilans AMR, pengendalian penggunaan antimikroba, pencegahan dan pengendalian infeksi, edukasi dan promosi kesehatan, serta diperlukannya inovasi dan penelitian.

“Pengendalian AMR harus dilaksanakan bersama dan bersatu padu, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, industri farmasi, dan masyarakat, memiliki peran penting dalam pengendalian AMR,” tambahnya.

dr. Azhar Jaya berharap seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini dapat menghasilkan rekomendasi dan aksi nyata yang berkontribusi dalam pengendalian resistansi AMR di Indonesia.

AMR membekali sistem kesehatan dengan mengurangi efektivitas pengobatan, yang menyebabkan peningkatan waktu rawat pasien dan peningkatan biaya perawatan kesehatan, peningkatan morbiditas dan mortalitas, sehingga mutu dan keselamatan pasien menurun.

Di Indonesia, kejadian resistansi yang terus meningkat adalah tuberkulosis resistansi obat, dengan angka kematian 4-5 kali lebih tinggi dibandingkan kasus tuberkulosis sensitif obat. Resistansi obat juga terjadi kepada hewan, yaitu ayam, babi, dan sapi yang membutuhkan pengawasan.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dr. L Rizka Andalucia, Apt menjelaskan Indonesia masih memiliki tantangan berat karena sebanyak 22,1% masyarakat menggunakan antibiotik oral yang sangat mudah didapatkan, baik itu bentuknya tablet atau sirup yang akan diberikan pada anak-anak. Dari angka itu, sebanyak 41% diantaranya memperoleh antibiotik tanpa resep.

Mengenai peredaran antimikroba, Dr. Rizka menyampaikan bahwa berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia, dari masyarakat yang menggunakan antibiotik oral dalam 1 tahun terakhir 41% diantaranya memperoleh antibiotik tanpa resep, termasuk dari apotek. Hal ini merupakan tantangan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menertibkan pendistribusian antimikroba di sarana pelayanan kesehatan, khususnya di apotek,” ungkap Dr. Rizka.

Dr. Rizka menambahkan, kondisi ini diperparah dengan adanya sebagian masyarakat memperoleh antibiotik bukan dari sarana pelayanan kesehatan, seperti dari warung, platform daring, atau tempat-tempat lain yang tidak sesuai. Untuk itu, pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam pengawasan distribusi antimikroba di masyarakat.

Dr. Rizka menjelaskan, upaya untuk mendukung program pengendalian AMR di Indonesia meliputi peningkatan akses pelayanan kefarmasian, peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, dukungan terhadap program pengendalian resistansi antimikroba, pengembangan inovasi dan teknologi, serta monitoring dan evaluasi.

“Melalui kolaborasi, kerja sama, sinergi dan komitmen bersama, kita wujudkan akses yang merata dan pelayanan kefarmasian berkualitas untuk mendukung penggunaan antimikroba yang bijak, demi masa depan kesehatan yang lebih baik bagi Indonesia,” tutup Dr. Rizka.

Tingkat kesadaran terhadap bahaya resistansi antimikroba masih rendah apabila dikaitkan dengan penggunaan antibiotik yang semakin meningkat

dan kepatuhan pemeriksaan mikrobiologi yang menurun. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada setiap jenjang di masyarakat dan pemangku kepentingan perlu terus ditingkatkan. Hal ini agar masyarakat dan pemangku kepentingan berpartisipasi mengendalikan AMR dengan cara pencegahan penyebaran penyakit infeksi melalui hygiene, sanitasi, dan pengendalian penggunaan antibiotik.

Salah satu upaya mengajak semua pihak berpartisipasi, Kemenkes menyelenggarakan Seminar Sehari dengan tema “Collaborative and Participatory Action in Tackling AMR” serta Pekan Kesadaran Resistansi Antimikroba (WAAW), yang merupakan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang AMR serta mendorong upaya bersama menghadapi resistansi antimikroba.

Tema WAAW 2024 adalah “Educate, Advocate, Act Now” (Edukasi, Advokasi, dan Bertindak Sekarang). Tema ini mengajak komunitas global untuk mengedukasi seluruh pemangku kepentingan tentang AMR, melakukan advokasi untuk penggalangan komitmen, dan mendorong aksi nyata di setiap level untuk mengatasi AMR.

Resistensi antimikroba memang tidak kasat mata, tetapi dampaknya nyata dan sudah di depan mata. Bisa jadi, korban AMR adalah keluarga, saudara, atau teman kita. Untuk itu, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian/lembaga, dinas kesehatan, asosiasi fasilitas layanan kesehatan, organisasi profesi kesehatan, mitra pembangunan, industri farmasi, organisasi masyarakat, para penyintas AMR, influencer, dan media untuk mencegah dan mengendalikan AMR. (*)

Mendikdasmen Bertemu Kapolri, Bahas Upaya Wujudkan Satuan Pendidikan Aman, Nyaman, dan RAMAH



JAKARTA-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) mengadakan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menciptakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan RAMAH (Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis) bagi siswa di seluruh Indonesia. Pertemuan ini membahas beberapa program dan inisiatif yang akan menjadi fokus kerja sama antara kedua lembaga tersebut.

Mendikdasmen menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas dukungan dan kesepahaman yang dicapai dalam pertemuan ini. Salah satu poin penting yang disepakati adalah penerapan pendekatan “restorative justice” dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan. “Kami sepakat dengan Bapak Kapolri bahwa berbagai persoalan di lembaga pendidikan sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Hal ini sesuai dengan prinsip restorative justice,” ujar Abdul Muati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta, Selasa (12/11).

Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), disepakati adanya program Polisi Mengajar atau Relawan Mengajar yang melibatkan unsur kepolisian. Program ini diharapkan dapat membantu menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang berada di wilayah yang sulit terjangkau. “Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan pendidikan bagi semua, di mana pun anak-anak Indonesia

berada,” tambahnya.

Pertemuan ini juga membahas rencana pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah ada antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Polri. Pembaruan ini akan mencakup program penyuluhan di sekolah-sekolah terkait ketertiban masyarakat serta inisiatif seperti Polisi Masuk Sekolah. “Kami ingin memastikan kerja sama ini tidak hanya menyelesaikan masalah dari hilir, tetapi juga melakukan upaya pencegahan di hulu,” Imbuhnya.

Selain itu, ada rencana untuk menghidupkan kembali program Pramuka Bhayangkara. Program ini diharapkan dapat membentuk karakter disiplin dan jiwa kepanduan di kalangan pelajar, sejalan dengan nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan untuk masa depan generasi muda Indonesia.

Dalam pertemuan ini, Mendikdasmen juga menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kedua undang-undang ini dianggap perlu diperbarui untuk memberikan perlindungan lebih bagi guru, baik dari sisi profesi maupun keamanan.

“Kami sedang mempertimbangkan dua opsi, apakah perlu merevisi undang-undang yang sudah ada atau membuat undang-undang baru. Kami akan mengkaji hal ini lebih lanjut dengan masukan dari masyarakat,” jelasnya.

Salah satu isu penting yang diangkat adalah mengenai anak didik yang mengalami masalah sosial dan psikologis, terutama yang menjadi korban kekerasan atau mengalami masalah asusila. Mendikdasmen mengusulkan dua opsi solusi, yakni mengembangkan Kate School seperti di Amerika Serikat, yang fokus pada pendidikan khusus bagi anak-anak dengan ma-

salah psikologis dan sosial, serta pendekatan forging yang selama ini dilakukan beberapa organisasi kemasyarakatan.

“Kami harus mencari jalan keluar agar anak-anak yang sudah menjadi korban tidak mengalami beban ganda. Mereka seharusnya tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa mendapatkan stigma negatif dari masyarakat,” ujar Abdul Muati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan perjanjian kerja sama yang lebih detail. Program kerja sama akan melibatkan sosialisasi di sekolah-sekolah terkait potensi kejahatan seperti narkoba, tawuran, dan bahaya konten negatif di media online. “Kami ingin memastikan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang yang aman bagi seluruh siswa,” ujar Kapolri.

Mendikdasmen menegaskan bahwa pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang lebih detail. Ia juga berharap kerja sama ini dapat segera diwujudkan dalam bentuk program nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh siswa dan tenaga pendidik di Indonesia.

“Kami ingin memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya bisa diakses oleh semua anak, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan generasi bangsa yang kuat dan hebat,” pungkas Mendikdasmen.

Diharapkan kerja sama antara Kemendikdasmen dan Polri ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan inklusif bagi semua siswa di Indonesia, serta mendukung pembentukan karakter positif generasi muda melalui pendekatan yang lebih humanis dan program pendidikan yang komprehensif. (kemnedikbud)

Harian Pagi

Baubau Post

Kritik, Lugas, Independen

Wartawan Baubau Post tidak menerima Imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik

Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky T.A
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : Rahim, ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisna

Layouter : Ririn

Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana : _
Kepala Biro Sultra : _

Kontributor Baubau : Iphul, **Kontributor Sultra :** Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, **Kontributor Busel :** Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo : Fauzan
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim, Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Pakar Hukum soal Pimpinan Baru KPK: Tamat Riwayat Independensi KPK



Komisi III DPR menggelar voting untuk memilih dan menetapkan masing-masing 5 nama capim terpilih KPK dan calon anggota terpilih untuk Dewas KPK periode 2024-2029

Pewarta: Alwan

JAKARTA-Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berisiko terancam dengan terpilihnya formasi lima pimpinan dan anggota dewas baru KPK.

Pasalnya, kata dia, para calon pimpinan KPK dan dewas yang terpilih setelah proses fit and proper test di Komisi III DPR itu ternyata--bisa dikatakan--berlatar belakang aparat penegak hukum institusi lain.

Menurut Abdul, keterpilihan tersebut memberikan gambaran buruk bagi perkembangan independensi lembaga antirasuah.

"Keterpilihan personil komisioner KPK 2024-2029 adalah gambaran buruk bagi perkembangan independensi penegakan hukum pemberantasan korupsi," ujarnya dalam sebuah perbincangan aplikasi pesan ke-pada CNNIndonesia.com, Jumat (22/11).

Abdul meyakini hal tersebut karena latar-latar belakang para calon pimpinan KPK yang terpilih di DPR itu semuanya berasal dari institusi penegak hukum yang menjadi alasan terbentuknya lembaga antirasuah itu pascareformasi 1998.

"Para personil komisioner terpilih justru berasal dari

latar belakang aparat penegak hukum pemerintahan yang justru menjadi dasar pertimbangan (konsiderasi UU) dilahirkannya KPK," kata Abdul.

"Yaitu lemah dan tidak objektifnya aparat penegak hukum pemerintahan pemberantasan korupsi (kepolisian dan Kejaksaan)," tambahna.

Sebagai organisasi independen negara, KPK resmi berdiri pada 2002 lalu lewat UU 30/2002. Namun, cikal bakalnya sudah muncul sejak pascareformasi setelah lahir UU 31/1999 tentang pemberantasan tipikor.

Dalam proses di Komisi III DPR, Komjen Pol Setyo Budiyo terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Jenderal bintang tiga polisi yang pernah jadi Direktur Penyidikan KPK itu dite-mani capim petahana Johanis Tanak yang berlatar belakang jaksa, Agus Joko Pramono (eks Wakil Ketua BPK), Fitroh Rohcahyanto (jaksa yang pernah jadi Direktur Penuntutan KPK), dan Ibnu Basuki Widodo (hakim di Pengadilan Tinggi Manado).

Sementara itu, untuk komposisi lima anggota Dewas KPK, Komisi III DPR memilih Chisca Mirawati (Founder & Managing Partner CMKP Law), Benny Mamoto (pensiunan jenderal Polri, man-

tan Ketua Harian Kompolnas), Wisnu Baroto (jaksa), Sumpeno (hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta), dan Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda).

Abdul menjelaskan, KPK bertugas mengawas di ranah eksekutif secara sistemik, namun personel yang kini terpilih untuk memimpin lembaga tersebut justru juga berasal dari kekuasaan eksekutif. Setelah revisi UU KPK pada 2019 lalu, lembaga antirasuah itu pun sudah masuk ke rumpun eksekutif di mana seluruh pegawainya berstatus ASN.

"Tuntas sudah KPK menjadi lembaga bagian dari kekuasaan, karena secara sistemik KPK berada di ranah eksekutif yang diisi oleh personil personil yang justru juga berasal dari kekuasaan eksekutif," tuturnya.

Selain itu, kata Abdul, hasil pemilihan ini berpotensi membangun prasangka bahwa tindakan tersebut sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah.

"Dengan hasil pilihan ini Komisi III telah 'sengaja' menjadi limbung akan fakta sejarah ini, demikian juga fakta ini bisa membangun prasangka bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pelemahan KPK," ujar Abdul.

"Maka amatlah riwayat independensi

KPK pada zaman pemerintahan baru ini," imbuhnya.

Untuk menyelamatkan independensi lembaga terdepan pengawalan tindak pidana korupsi itu, Abdul berpendapat bahwa peranan masyarakat sangat dibutuhkan. Ia menyampaikan, masyarakat harus selalu kritis dalam mengawal KPK.

"Masyarakat Indonesia terutama yang concern dengan pemberantasan korupsi harus terus mengawal KPK, masyarakat harus terus kritis jika diperlukan bisa menggunakan upaya hukum, praperadilan misalnya,"

Menurutnya, sejumlah upaya seperti pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dapat dilakukan untuk membatalkan hasil pemilihan tersebut.

"Tidak mustahil ini juga jadi bagian dari pengawalan terhadap eksekutif. Karena itu juga tidak mustahil melakukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk membatalkan hasil pemilihan ini ke pengadilan," kata Abdul.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menyangkal tuduhan dari koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Transparency International Indonesia (TII) bahwa pemilihan calon pimpinan serta anggota dewas KPK

Ibu AKP Ulil Masih Syok Anaknya Tewas Tragis Ditembak Rekan Polisi

Laporan: Hadi

MAKASSAR--Ibu Kasat Reskrim Polres Solok, AKP Ulil Riyanto Anshari syok setelah menerima kabar anaknya tewas ditembak oleh Kabag Ops Polres Solok, AKP Dadang Iskandar.

"Mamanya masih syok," kata paman korban, AKBP (Purn) Joni Mangin di rumah duka, Makassar, Jumat (22/11).

Joni mengatakan pihak keluarga tidak menyangka AKP Ulil Riyanto meninggal dengan cara ditembak oleh sesama anggota Polri saat melaksanakan

tugasnya.

"Kami sangat kaget dan tidak disangka, almarhum pergi dengan tragis, di mana anak ini melaksanakan tugas. Di mata keluarga anak ini baik, sangat peduli sama keluarga dan familiar. Belum berkeluarga, masih bujang," ujarnya.

Sementara ini, kata Joni, pihak keluarga tengah bersiap menyambut kedatangan jenazah AKP Ulil yang akan diberangkatkan dari Jakarta ke Makassar.

"Jadi jenazah berangkat dari Jakarta jam 7 malam, mungkin jenazah tiba jam 9 malam sampai di sini, sekarang dalam

proses dari Sumatera ke Jakarta. Jadi di rumah duka akan disemayamkan keluarga ibadah sambil menunggu rencana berikutnya," katan-ya.

Joni belum mengetahui pasti lokasi pemakaman AKP Ulil. Menurutnya, pihak keluarga akan membahas lebih dahulu terkait pemakaman keponakannya itu.

"Kami belum embuk dan kami belum tahu dimana dimakamkan. Saya perkiraan akan dimakamkan di TPU Panaikang, karena disitu ada makam kakeknya," ujarnya. (*)

DPR Terjun Usut Dugaan Tambang Ilegal di Balik Kasus Penembakan Polisi

Laporan: Hadi

JAKARTA- Komisi III DPR meminta kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyanto Anshari diusut secara tuntas.

Ketua Komisi III Habiburokhman meminta tak hanya kasus penembakannya belaka yang diusut secara tuntas, melainkan juga kasus yang menjadi penyebab pertikaian tersebut.

"Kami minta peristiwa ini diusut tuntas baik kasus penembakan hingga tewasnya maupun kasus yang melatarbelakangi pertikaian ini. Info yang kami dapat terkait dengan penindakan penambangan ilegal tipe galian C," kata Habib dalam konferensi pers, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (22/11).

periode 2024-2029 sudah dikondisikan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan publik dapat melihat proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar sebelum proses pemilihan oleh pihaknya.

"Saya berpendapat sebaliknya. Publik bisa melihat sendiri proses pemilihan

Habib meminta pihak terkait untuk mengusut apakah betul pelaku benar menjadi beking tambang ilegal yang tengah dalam penindakan oleh korban beserta jajarannya.

Habib pun menyatakan ia akan memanggil jajaran terkait di Polri untuk mengusut kasus ini. "Kami akan memanggil Kapolres [Solok Selatan], Kapolda, dan Kadiv Propam Mabes Polri agar kasus-kasus seperti ini bisa benar-benar diusut secara tuntas dan juga jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari," ujarnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyanto Anshari yang menjadi korban penembakan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar di

Mapolres Solok Selatan Sumbang.

Akibatnya korban mengalami luka yang amat serius dan harus dirujuk ke Kota Padang untuk mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbang.

Meski demikian, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Rencananya, jenazah korban akan diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Buntut peristiwa ini, Kapolda Sumbang Irjen Suharyono menyatakan akan memberikan sanksi pemecatan terhadap Dadang.

"Pastinya tindakannya tegas, dalam minggu ini kami sudah ada proses PTDH dalam minggu ini, setidaknya-tidaknya sampai 7 hari ke depan," kata dia. (*)

capim dan cadewas berlangsung sangat demokratis," kata Habib lewat sambungan telepon, Kamis (21/11).

Menurutnya, suara yang diperoleh dari voting akan cenderung sama pada orang tertentu apabila ada pengkondisian, sedangkan perolehan suara saat itu cukup variatif.

"Perolehan suara para kandidat juga

variatif. Logikanya kalau ada pengondisian, pasti lima orang yang terpilih perolehan suara tak akan sama," ucapnya.

Habib pun menambahkan bahwa DPR sejak awal telah membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, namun tak ada perwakilan dari koalisi masyarakat yang melakukan hal itu. (*)

1



CALON BUPATI
SYARASWATI

CALON WAKIL BUPATI
Drs. H. RASYID
MANGURA, M.H.

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

VISI

MEWUJUDKAN KABUPATEN BUTON YANG MANDIRI, MAJU,
DAN BERDAYA SAING MELALUI OPTIMALISASI
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MISI

1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING.
2. MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.
3. MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DENGAN TEKNOLOGI MODERN.
4. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
5. MENGOPTIMALKAN PARAWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DAN BUDAYA LOKAL.
6. MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF

2



CALON BUPATI
Drs. LA BAKRY, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
ARIS MARWAN SAPUTRA,
S.H.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BUTON SEBAGAI KAWASAN BISNIS DAN BUDAYA TERDEPAN
MENUJU INDONESIA EMAS 2045

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) SAINS, TEKNOLOGI DAN TATA RUANG KAWASAN.
2. TRANSFORMASI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).
3. KESETARAAN GENDER, PEMULA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z) DAN PENYANDANG DISABILITAS.
4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, UMKM DAN INDUSTRI KREATIF.
5. REFORMASI BIROKRASI, KESADARAN HUKUM DAN TRANSPORTASI KEBUAKAN PEMERINTAH DAERAH.
6. PERKUAT PENYELARASAN HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA.

3



CALON BUPATI
H. LA ODE NAANE

CALON WAKIL BUPATI
H. AKALIM, S.Pd.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG
CERDAS, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MENGHARGAI
PERBEDAAN DAN MEMILIKI JIWA GITONG ROYONG

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE, DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BAGI MASYARAKAT BUTON SMART.
2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU MENUJU GENERASI BUTON EMAS.
3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
4. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KABUPATEN BUTON YANG CERDAS (BUTON SMART CITY).
5. MENGUTUKAN BUDAYA MASYARAKAT YANG SALING MENGHARGAI DAN JIWA GOTONG ROYONG.

4



CALON BUPATI
Drs. BASIRAN, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
LA ODE RAFIUN, S.Pd.,
M.Si.

PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BUTON MAJU, TERCIPTANYA MASYARAKAT BUTON YANG ADIL DAN MAKMUR DI
TAMBAH DENGAN MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA
KONDISI EKONOMI MASYARAKAT LEBIH BAIK. BUTON BERDAYA SAING, MASYARAKAT
BUTON YANG MEMILIKI KELUANGGULAN KOMPETITIF UNTUK MENGHADAPI
PERSAINGAN DI MASA YANG AKAN DATANG MENUJU INDONESIA EMAS 2045-2049

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUBERDAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN MUDA, SERTA TERJANGKAU
3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF DENGAN PERTIMBANGAN DAYA SERAP TENAGA KERJA PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
4. MENINGKATKAN KETAHANAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BERBAGAI MACAM ANCAMAN DAN GANGGUAN BERLANDASKAN NILAI NILAI FALSAFAH DAN BUDAYA KEBUTONAN DENGAN MENUNJUNG TINGGI NORMA KEAGAMAAN.
5. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA DASAR YANG PRIORITAS UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA DAERAH MAJU BAIK KUANTITAS MAUPUN KUALITAS
6. MENIMPLEMENTASIKAN ADAT ISTADAT DAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM MENAIKAN KARASITAS DAERAH.

5



CALON BUPATI
Dr. BERE ALI, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
LAODE MUHAMAD
SUMARLIN BUCHARI, S.E.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BERLIAN MEWUJUDKAN BUTON YANG LEBIH BAIK

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI MODAL UTAMA PEMBANGUNAN.
2. PENUMBUHAN INVESTASI SEBAGAI SARANA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA.
3. PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA.
5. PELAYANAN PUBLIK YANG SEMAKIN EFEKTIF DAN EFISIEN.

6



CALON BUPATI
ALVIN AKAWIJAYA
PUTRA, S.H.

CALON WAKIL BUPATI
SYARIFUDIN SAAFA, S.T.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG RELIGIUS, SEJAHTERA,
MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN
YANG BERKELANJUTAN (BUTON BERSINAR MAS)

MISI

1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), SERTA MENDORONG TERCIPTANYA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG RELIGIUS, KONDusif DAN BERBUDAYA.
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS.
3. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS POTENSI LOKAL, MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN KESEMPATAN BERUSAHA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN.